

Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Kompetensi Aparatur Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Pekalongan)

Sunny Safryani¹, Gregorius N. Masdjojo²

^{1,2} Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh penganggaran berbasis kinerja, komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja dengan kompetensi aparatur sebagai variable moderasi. Jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian metode asosiatif bentuk pola hubungan yaitu hubungan kausal, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini meliputi seluruh Tim Anggaran Perangkat Daerah di seluruh SKPD lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang berjumlah 31 SKPD. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 110 orang yang meliputi Pengguna Anggaran, PPK-SKPD serta Kasubag Renval dan Keuangan serta PPTK kegiatan atau disebut juga sampel populasi. Analisa data yang dipilih yaitu regresi moderasi selisih mutlak pure dalam pengukuran variable moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja dan komitmen organisasi berpengaruh positif serta signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, kompetensi aparatur tidak memiliki pengaruh sebagai variable moderasi penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan kompetensi aparatur memperkuat komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja. Variable penganggaran berbasis kinerja dan komitmen organisasi dimasukkan ke dalam model regresi mampu memberikan penjelasan terhadap akuntabilitas kinerja sebesar 84,2% dan 15,8% sisanya dijelaskan oleh factor lain.

Kata Kunci : Penganggaran Berbasis Kinerja, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas Kinerja

Copyright (c) 2022 Sunny Safryani

✉Corresponding author :

Email Address : sunnysafryani@mhs.unisbank.ac.id

PENDAHULUAN

Akuntabilitas menjadi salah satu kriteria utama dalam mewujudkan *good governance* yang baik. Mardiasmo (2009:121) menerangkan bahwa akuntabilitas yaitu suatu kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, serta efektif. Lembaga publik pusat maupun daerah mempunyai tuntutan akuntabilitas dimana seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun perencanaan secara strategik, melakukan pengukuran kinerja serta melaporkannya.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah beberapa kali diperbaharui, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah seperti yang disebut diatas didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran. UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 19 (1) dan (2) menerangkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan menggunakan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Undang-undang ini memberikan konsekuensi bagi daerah dalam pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif, ekonomis dan efisien.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020 sesuai dengan surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/482/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang terkait Pelaporan Kinerja adalah Nilai SAKIP pada tahun 2020 sebesar 73,07 dengan predikat BB, nilai SAKIP yang diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun 2019 sebesar 72,59 dengan predikat BB. Namun hal yang masih perlu diperhatikan yaitu masih perlunya perbaikan indikator kinerja dari tujuan serta sasaran terkait dengan relevansi, formulasi pengukuran serta kecukupan indikator. Selain itu juga terdapat gambaran kinerja yang belum dilakukan pada level individu pegawai sehingga keselarasan pengukuran antara kinerja individu pegawai dengan kinerja organisasi belum terkontrol dengan baik dengan baik.

Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah dipengaruhi beberapa factor, tetapi penelitian ini yang digunakan yaitu penganggaran berbasis kinerja dan komitmen organisasi serta kompetensi aparatur sebagai variable moderasi untuk mengukur pengaruh factor tersebut terhadap akuntabilitas kinerja tersebut.

Teori Keagenan

Merujuk pada teori keagenan oleh Haspiarti (2011) konsep akuntabilitas dijelaskan dengan menggunakan teori keagenan, dalam arti luas akuntabilitas dapat dilihat sebagai kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah sebagai agen untuk melaksanakan akuntabilitas, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pemberi tanggung jawab dalam hal ini masyarakat yang diwakili oleh DPRD yang berhak dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban. Konsep ini mendukung variable akuntabilitas kinerja. Dengan penganggaran berbasis kinerja dan komitmen organisasi, diharapkan pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerja yang lebih baik.

Teori Stewardship

Teori stewardship menggambarkan bahwa tidak ada situasi manajemen yang berada pada tujuan individu tetapi lebih berfokus pada kepentingan organisasi. Asumsi teori ini bahwa ada hubungan kuat antara kepuasan serta keberhasilan organisasi. Dalam teori ini, pemerintah bertindak sebagai pelayan dan tidak memiliki keinginan untuk

memenuhi kepentingan pribadi. Namun mengutamakan kebutuhan masyarakat, menghindari konflik kepentingan antara eksekutif serta fungsi eksekutif organisasi. Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai pelayan masyarakat, bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang tersedia secara bijaksana dan hati-hati dalam menyelenggarakan pelayanan public. Untuk itu, pemerintah memandang kebutuhan masyarakat secara luas daripada memenuhi kepentingan pribadi sehingga aktualisasi diri dilandasi oleh kepercayaan masyarakat.

Penganggaran Berbasis Kinerja

Bastian (2006) menyatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada keluaran organisasi dan berkaitan sangat erat dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis organisasi. Penganggaran berbasis kinerja mengalokasikan sumberdaya untuk program bukan hanya pada unit organisasi semata dan menggunakan ukuran keluaran sebagai indikator kinerja organisasi”.

Penganggaran berbasis kinerja memiliki kerangka kerja yang dibangun secara sistematis dalam menghasilkan anggaran berbasis kinerja. Dalam pedoman Deputi Penganggaran Berbasis Kinerja IV BPKP (2005:16) dijelaskan bahwa dasar penganggaran berbasis kinerja tidak bisa dipisahkan dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan siklus akuntabilitas anggaran itu sendiri. Rencana strategis tersebut sesuai dengan target rutin tahunan dan terus ditingkatkan pada akhirnya. Penganggaran berbasis kinerja digunakan sebagai umpan balik pada keseluruhan rencana strategis.

Komitmen Organisasi

Mowday dkk (1982) dalam Putra (2013) mengartikan komitmen organisasi sebagai kekuatan relative dari identifikasi individu dengan dan keterlibatan dalam organisasi tertentu. Definisi itu menunjukkan bahwa komitmen organisasi lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif serta keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi organisasi

Kompetensi Aparat

Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan dasar serta kualitas kerja yang diperlukan dalam mengerjakan pekerjaan dengan baik. Kompetensi aparatur pemerintah daerah merupakan kemampuan yang wajib dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap serta perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya (Inapty dan Martiningsih, 2016).

Akuntabilitas Kinerja

Halim dalam Herawaty (2012) mendefinisikan akuntabilitas publik adalah pemberian informasi serta pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak yang berkepentingan. Dengan informasi serta pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah harus mau serta mampu menjadi subyek pemberi informasi terhadap aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten serta dapat dipercaya. Pemberian informasi serta pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak masyarakat, yaitu hak mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak mendapat penjelasan, serta hak pertanggungjawaban.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian metode asosiatif dengan bentuk pola hubungan yaitu hubungan kausal, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh Tim Anggaran Perangkat Daerah yang ada di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang berjumlah 31 SKPD. Metode pengambilan sample yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan criteria yang ditentukan. Adapun yang menjadi sampel berjumlah 110 orang yang meliputi Pengguna Anggaran, PPK-SKPD serta Kasubag Renval dan Keuangan serta PPTK kegiatan..Analisa data yang dipilih yaitu regresi moderasi selisih mutlak pure dalam pengukuran variable moderasi

Hasil dan Pembahasan

Analisa Regresi linear Berganda

	Model	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1	(Constant)		-1.060	.292
	Penganggaran Berbasis Kinerja	.815	14.594	.000
	Komitmen Organisasi	.184	3.236	.002
	MOD1	-.537	-8.970	.000
	MOD2	.260	5.512	.000

Sumber : Output SPSS Olah Data Th. 2022

Hasil uji analisa regresi moderasi dengan metode selisih mutlak pure menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dari setiap variable penganggaran berbasis kinerja, komitmen organisasi, kompetensi aparatur didapatkan persamaan regresi berganda dengan metode selisih mutlak pure sebagai berikut:

$$Y = 0,815 X_1 + 0,184 X_2 - 0,537 \text{ moderasi}_1 + 0,260 \text{ moderasi}_2 + e$$

Uji Validitas

No	Variabel	KMO and Bartlett's Test	Sig.
1	Penganggaran Berbasis Kinerja	0,717	0,000
2	Komitmen Organisasi	0,796	0,000
3	Kompetensi Aparatur	0,768	0,000
4	Akuntabilitas Kinerja	0,693	0,000

Berdasarkan hasil olah data SPSS, nilai *Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)* masing-masing variable menunjukkan hasil yang baik (>0,05). Dapat disimpulkan bahwa syarat analisis factor pertama dapat terpenuhi. Hasil nilai *Barlett Test of Spheriscity* nilia masing-masing variable pada signifikansi 0,000, nilai tersebut menunjukkan bahwa pembentuk variable sudah baik

Uji Reliabilitas

No	Variabel	Crobach's Alpha	Keterangan
1	Penganggaran Berbasis Kinerja (X1)	0,888	Reliabel
2	Komitmen Organisasi (X2)	0,940	Reliabel
3	Kompetensi Aparatur (Z)	0,916	Reliabel
4	Akuntabilitas Kinerja (Y)	0,844	Reliabel

Sumber : Output SPSS Olah Data Th. 2022

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, nilai *Crobach's Alpha* keseluruhan variable tersebut mempunyai nilai > 0,7 dengan nilai masing-masing variable yaitu penganggaran berbasis kinerja sebesar 0,888, komitmen organisasi sebesar 0,940, kompetensi aparatur sebesar 0,916 serta akuntabilitas sebesar 0,844. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variable penganggaran berbasis kinerja, komitmen organisasi, kompetensi aparatur serta akuntabilitas sudah reliable.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11342032
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.059
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Output SPSS Olah Data Th. 2022

Proses Uji normalitas penelitian ini menggunakan data responden sebanyak 101 responden, diolah menggunakan SPSS versi 26.0. Proses uji normalitas data dilakukan dengan mengeluarkan outlier, sehingga data yang diuji terdistribusi normal sebanyak 86 responden. Sebagaimana disajikan pada tabel 4.16 bahwa nilai Asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,200, dapat disimpulkan bahwa nilai asymp.sig > 0,05 maka nilai residual model regresi tersebut berdistribusi normal.

Uji Heterokedasitas

	Nama Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	.388	.153		2.533	.013
2	Penganggaran Berbasis Kinerja	-.026	.035	-.099	-.739	.462
3	Komitmen Organisasi	-.040	.021	-.266	-1.959	.054
	MOD1	.008	.025	.045	.313	.755

4	MOD2	.007	.024	.032	.282	.779
5						

Sumber : Output SPSS Olah Data Th. 2022

Berdasarkan hasil uji heterokedasitas nilai sig. masing-masing variable yaitu sebesar 0,462 untuk variable penganggaran berbasis kinerja , 0,054 untuk variable kompetensi aparatur, 0,755 untuk variable penganggaran berbasis kinerja dimoderasi kompetensi aparatur, 0,779 untuk variable komitmen organisasi dimoderasi kompetensi aparatur. Dari hasil tersebut, disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak mengalami heterokedasitas. Hal ini karena nilai dari masing- masing variable tidak signifikan atau nilai Sig lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05).

Uji F

Keterangan	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Signifikan si
1 Regression	5.862	4	1.465	102.054	.000 ^b
Residual	1.091	76	.014		
Total	6.953	80			

Sumber : Output SPSS Olah Data Th. 2022

Berdasarkan uji F menggunakan SPSS diketahui bahwa hasil uji F sebesar 102,054 dengan tingkat probabilitas tingkat kesalahan sebesar 0,000 yang memiliki nilai lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam melihat pengaruh variable penganggaran berbasis kinerja, komitmen organisasi, dan kompetensi aparatur memenuhi *goodness of fit* model (kesesuaian terhadap akuntabilitas kinerja).

1. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.923 ^a	.852	.842	.11714

Berdasarkan uji koefisien determinasi diketahui bahwa hasil uji Adjusted R Square sebesar 0,842 yang membuktikan bahwa variable independen yang dimasukkan ke dalam model regresi mampu memberikan penjelasan terhadap variable dependen sebesar 84,2% dan 15,8% sisanya dijelaskan oleh factor lain.

2. Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis digunakan dalam melihat pengaruh penganggaran berbasis kinerja, komitmen organisasi dan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas kinerja setelah dilakukan uji hipotesis. Berdasarkan olah data SPSS hasil analisisnya yaitu sebagai berikut :

- a. Hipotesis pertama dengan nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05 dan koefisien beta sebesar 0,815 sehingga hipotesis pertama dinyatakan diterima. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa variable penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif serta signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan.
- b. Hipotesis kedua dengan nilai sig. sebesar 0,002 < 0,05 dan koefisien beta sebesar 0,184, sehingga hipotesis kedua dinyatakan diterima. Hasil uji tersebut

menunjukkan bahwa variable komitmen organisasi berpengaruh positif serta signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan.

- c. Hipotesis ketiga dengan nilai sig. sebesar $0,000 < 0,05$ dan koefisien beta sebesar $-0,537$ bertanda negative, sehingga hipotesis ketiga dinyatakan ditolak. Hasil uji tersebut dapat diartikan bahwa kompetensi aparatur tidak memoderasi penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan.
 - d. Hipotesis keempat dengan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ dan koefisien beta sebesar $0,260$, sehingga hipotesis keempat dinyatakan diterima. Hasil uji tersebut dapat diartikan bahwa kompetensi aparatur memoderasi komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan.
3. **Uji Regresi linear Berganda**
Hasil uji analisa regresi moderasi dengan metode selisih mutlak pure menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dari setiap variable penganggaran berbasis kinerja, komitmen organisasi, kompetensi aparatur didapatkan persamaan regresi berganda dengan metode selisih mutlak pure sebagai berikut:
$$Y = 0,815 X_1 + 0,184 X_2 - 0,537 \text{ moderasi}_1 + 0,260 \text{ moderasi}_2 + e$$
 4. **Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja**
Berdasarkan uji analisa regresi berganda yang dilakukan antara variable penganggaran berbasis kinerja sebagai variable X_1 terhadap akuntabilitas kinerja sebagai variable y menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar $0,815$ dan sig $0,000 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variable penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husaeri Priatna, dkk (2018), Muhammad Yamin (2021) serta Dewi Selviani (2020) bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.
 5. **Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja**
Berdasarkan uji analisa regresi berganda yang dilakukan antara variable komitmen organisasi sebagai variable X_2 terhadap akuntabilitas kinerja sebagai variable y menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar $0,184$ dan sig $0,000 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variable komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi merupakan peran penting dalam peningkatan kinerja Pemerintah Daerah karena komitmen yang tinggi menjadi individu lebih memperhatikan organisasi dari pada kepentingan pribadi serta berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Sebaliknya apabila komitmen organisasi rendah akan membuat individu untuk berbuat demi kepentingan pribadinya. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Tarjo (2019) dan Aprilia Bayan dkk (2020) dengan variable Kompetensi Aparat desa serta Komiten organisasi terhadap akuntabilitas kinerja, menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi aparat desa dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.
 6. **Kompetensi aparatur tidak memoderasi pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja**

Pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak memiliki pengaruh sebagai variable moderasi penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja, dimana berdasar hasil uji analisa regresi berganda pada tabel 4.20 bahwa nilai koefisien sebesar -0,537 dan sig $0,000 < 0,05$, nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap kegiatan penganggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan saat ini masih kurang memadai dalam menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga akuntabilitas kerjanya pun dianggap belum maksimal dilakukan. Hasil penelitian ini mendukung Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020 sesuai dengan surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/482/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang terkait pelaporan adanya beberapa catatan yang masih perlu diperhatikan yaitu masih perlunya perbaikan indicator kinerja dari tujuan serta sasaran terkait dengan relevansi, formulasi pengukuran serta kecukupan indikator. Selain itu juga terdapat gambaran kinerja yang belum dilakukan pada level individu pegawai sehingga keselarasan pengukuran antara kinerja individu pegawai dengan kinerja organisasi belum terkontrol dengan baik dengan baik.

7. **Kompetensi aparatur memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja**

Pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh sebagai variable moderasi dan memperkuat komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja, dimana berdasar hasil uji analisa regresi berganda bahwa nilai koefisien sebesar 0,260 dan sig $0,000 < 0,05$, nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur memberikan pengaruh yang kuat terhadap komitmen organisasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Penelitian ini sesuai dengan teori Spencer and Spencer dikutip oleh Moehariono (2010:3), a competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion referenced effective and or superior performance in a job situation. Kompetensi yaitu karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaan atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja atau superior di tempat kerja atau dalam situasi tertentu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh penganggaran berbasis kinerja, komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja serta kompetensi aparatur sebagai variable moderasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan.
2. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan. Dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi merupakan peran penting dalam peningkatan kinerja Pemerintah Daerah karena komitmen yang tinggi menjadi individu lebih memperhatikan

organisasi dari pada kepentingan pribadi serta berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik.

3. Kompetensi aparatur tidak memoderasi pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja. Kompetensi yang dimiliki aparatur Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan saat ini masih kurang memadai dalam menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga akuntabilitas kerjanya pun dianggap belum maksimal dilakukan.
4. Kompetensi aparatur memiliki pengaruh sebagai variable moderasi dan memperkuat komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan dengan adanya komitmen tinggi yang dimiliki oleh seseorang serta diperkuat dengan kompetensi aparatur yang baik.

Referensi :

- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). 10, 12.
- Endrayani, K. S., Adiputra, I. M. P., & Darmawan, N. A. S. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2(1), 11.
- Ferniyanti, N., Supriyadi, E., & Pertanian, K. (2019). Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Pelaksanaan Anggrana Berbasis Kinerja Dan Evaluasi Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Kasus Pada Badan Karantina Pertanian Jakarta). 4(1), 13.
- Hafiz, M., Rasuli, M., & Kurnia, P. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pad (Issue 1) [Journal: Earticle, Riau University]. <https://www.neliti.com/publications/134439/>
- Hardiningsih, P., Udin, U., Masdjojo, G. N., & Srimindarti, C. (2020). Does Competency, Commitment, And Internal Control Influence Accountability? The Journal Of Asian Finance, Economics And Business, 7(4), 223–233. <https://doi.org/10.13106/Jafeb.2020.Vol7.No4.223>
- Indrayani, L. F., Diatmika, P. G., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik. 8(2), 13.
- Matani, C. D., & Hutajulu, L. (2021). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung Dikota Jayapura. Keuda (Jurnal

Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah), 5(3).
<https://doi.org/10.52062/Keuda.V5i3.1532>

- Priatna, H., & Nuraisyah, E. (N.D.). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 24.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281. <https://doi.org/10.25105/Mraai.V20i2.7894>
- Rofika., & Ardianto. (2014). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sukarno, S. A., Tinangon, J. J., & Tangkuman, S. J. (2020a). Pengaruh Kompetensi Aparat Dan Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara). *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 110–117. <https://doi.org/10.32400/Iaj.27981>
- Sukarno, S. A., Tinangon, J. J., & Tangkuman, S. J. (2020b). Pengaruh Kompetensi Aparat Dan Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara). *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.32400/Iaj.27981>
- Suriani, S. (2015). The Effect Of Performance-Based Budgeting Implementation Towards The Institution Performance Accountability (Case Study: Wajo). *Information Management And Business Review*, 7(4), 6–22. <https://doi.org/10.22610/Imbr.V7i4.1158>
- Wahdatul, L., Rahayu, S., & Dillak, V. J. (N.D.). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. 6.
- Wibisono, S. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5, 22.
- Yamin, M. (N.D.). Pengaruh Kompetensi Aparatur Dan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan). 22.